

**POLA PENGKADERAN PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa**

Kota Palembang)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi salah satu syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Sosial (S.Sos) Program Studi
Politik Islam**

Di Susun Oleh

Shela Perila Octrien

1564302027

**PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2020**

SKRIPSI

**POLA PENGKADERAN PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa**

Kota Palembang)

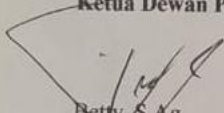
Disusun dan dipersiapkan oleh :

SHELA PERILA OCTRIEN
NIM. 1564302027

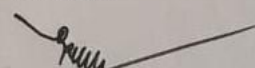
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 April 2020

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

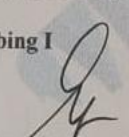
Ketua Dewan Penguji


Betty S. Ag
NIP. 197004211999032003

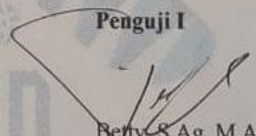
Sekretaris


Kiki Mikail, M.A
NIP. 198409212019031004

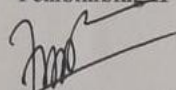
Pembimbing I


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP. 19711124200312001

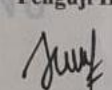
Penguji I


Betty S. Ag, M.A
NIP. 197004211999032003

Pembimbing II


Yulion Zalpa, M.A
NIP. 198807072019031011

Penguji II

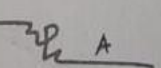

Nico Oktario Adytyas, M.A
NIDN. 2010109102

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Tanggal, 23 Juni 2020

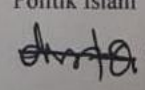


Dekan

Fakultas Adab dan Humaniora


Dr. Nur Huda, M.Ag., M.A
NIP. 19701114 2000031002

**Ketua Program Studi
Politik Islam**


Ottoman, S.S, M.Hum
NIP. 197605162007101005

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara
Shela Perila Octrien

**Kepada Yang Terhormat.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di_ Tempat**

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Pola Pengkaderan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang
Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)”**

Yang ditulis oleh:

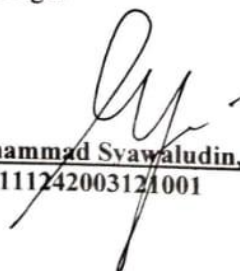
Nama : Shela Perila Octrien
NIM : 1564302027
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 05 Februari 2020

Pembimbing I.


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.197111242003121001

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara
Shela Perila Octrien

**Kepada Yang Terhormat.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di_**
Tempat

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Pola Pengkaderan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang
Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Shela Perila Octrien
NIM : 1564302027
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 03 Februari 2020

Pembimbing II.


Yulion Zalpa, M.A
NIP. 198807072019031011

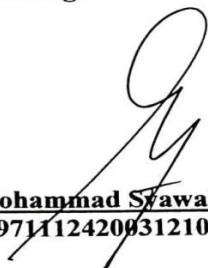
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Shela Perila Octrien NIM 1564302027

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 05 Februari 2020

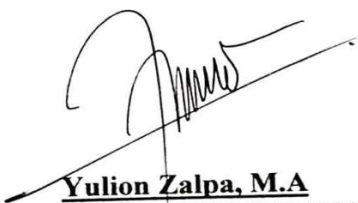
Pembimbing I



Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP.197111242003121001

Palembang, 05 Februari 2020

Pembimbing II



Yulion Zalpa, M.A
NIP. 198807072019031011

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shela Perila Octrien

NIM : 1564302027

Jurusan : Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Sepengetahuan saya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 05 Februari 2020



Shela Perila Octrien
NIM: 1564302027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“HIDUP ITU BELAJAR, BERUSAHA DAN
BERDOA, SETELAHNYA BERSYUKUR”***

-Shela Perila Octrien

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- **Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama perkuliahanku sampai sekarang.**
- **Saudara-saudarai tersayang ku Kakak Febie Goes Cahyudi , Adek Icie Swandinie, Adek M. Rizqoe Keilandri Noviet yang telah memberikan semangat serta motivasi kuliah untuk menyelesaikan pendidikan ini.**
- **Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Keluarga dan para kaum muslimin yang telah berjihad meletakkan sendi- sendi dasar agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman bagi hidup manusia di muka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari keluarga, dosen, teman-teman penulis, baik bantuan moril maupun materil. Bantuan tersebut telah meringankan beban penulis sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **“POLA PENGKADERAN PARTAI POLITIK (Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)”**.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Terimakasih kepada Ayahanda Yunedi Mukal dan Ibunda Nurbaiti yang telah memberikan do'a dan dorongan baik moril maupun materil serta motivasi yang tak henti-hentinya.
2. Untuk Seluruh Keluarga Besarku saudara-saudariku tercinta juga berperan penting dalam memberikan dukungan, semangat, inspirasi serta doa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Rektor UIN Raden Fatah Palembang Bapak Prof.Dr.Muhammad Sirozi,Ph.D
4. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora.
5. Bapak Dr.Moh. Syawaluddin M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak

6. Yulion Zalpa, S.Fil.,M.A selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Jurusan Politik Islam Ottoman, M.Hum dan Sekretaris Jurusan Bapak Kiki Mikail, M.A yang tidak henti-hentinya mendengarkan keluhan dan selalu memberikan masukan serta motivasi untuk mendorong menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Palembang, Keluarga besar DPC PKB Kota Palembang, Keluarga besar Politik Islam angkatan 2014, terimakasih atas semangat, kerjasama dan kebersamaanya selama ini.
9. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT juga kita berserah diri dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan kata dan tata bahasa.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq,

Palembang, Februari
2020
Penulis

Shela Perila Octrien
NIM. 1564302027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	ix
MOTTO DAN PERESEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB II SEJARAH DAN AD/ART PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
A. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa Nasional Dan Lokal.....	21
B. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Pengurus Cabang Kota Palembang	27

C. Tujuan Partai Kebangkitan Bangsa.....	30
D. Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa	31
E. Asas dan Perjuangan PKB	35
F. Prinsip Dasar Perjuangan PKB	36
G. Struktur Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Pengurus Cabang PKB Kota Palembang	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Pola Pengkaderan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang	42
1. Tingkat Dasar	44
2. Tingkat Menengah.....	45
3. Tingkat Lanjut	46
B. Eksistensi Kader PKB Di Tingkat Politik Lokal Kota Palembang ...	47
1. Gerakan Pemuda Satu Bangsa (Garda Bangsa)	48
2. Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba)	51
3. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB).....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

“POLA PENGKADERAN PARTAI POLITIK (Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)”.

Oleh
Shela Perila Octrien

Partai Kebangkitan Bangsa atau yang sering disingkat PKB, didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi’ul awal 1419 Hijriah / 23 Juli 1998 Masehi. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Setiap partai politik memiliki pola pengkaderan yang berbeda, dimana pola pengkaderan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Kaderisasi merupakan sebuah pembentukan atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu mengkaji terlebih dahulu tentang pola pengkaderan yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa berusaha tugasnya untuk mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta menjalankan tugas- dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengkaderan DPC PKB kota Palembang dan untuk mengetahui bagaimana eksistensi PKB di tingkat Politik Lokal. Penelitian ini adalah penelitian (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan mengangkat data yang ada di lapangan. Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode yang dipakai yaitu metode interview, dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa ada tiga tahapan pola yang dilakukan oleh PKB dalam merekrut kader-kader mereka. Para kader harus melewati jenjang tingkat dasar terlebih dahulu yaitu: Pemahaman arti berorganisasi, menanamkan loyalitas berorganisasi dan memantapkan dedikasi. kemudian dilanjutkan dengan jenjang tingkat menengah meliputi: Membuka wawasan berpikir yang berdasarkan ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. dan yang terakhir dilanjutkan dengan jenjang tingkat lanjut yaitu: Membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, membidik cara berpikir sistematis dan strategis dan membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasinya serta mendidik berpikir futuristik.

Melalui tahapan tersebut diharapkan PKB bisa mendapatkan kader - kader yang berkualitas untuk dapat beregenerasi dengan sebaik-baiknya demi berlangsungnya kemajuan partai, hal ini disebabkan karena kader merupakan ujung tombak sebuah partai untuk dapat membawa partai ke arah yang lebih baik dan visi misi partai juga dapat tercapai dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judul skripsi ini “Pola Pengkaderan Partai Politik (Studi kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah-istilah yang terdapat didalamnya.

Pola Pengkaderan adalah bentuk proses mendidik seseorang menjadi kader. Deteksi pola dasar disebut pengenalan pola, salah satu pola dasar yang dapat dilihat adalah pola pengkaderan. Istilah kader, umumnya menunjukkan pada pengertian kelompok elit atau inti sebagian kelompok atau jamaah yang memiliki kemampuan dan yang telah lulus dalam proses seleksi.

Pengkaderan berarti proses bertahap dan terus-menerus sesuai tingkatan, capaian, situasi dan kebutuhan tertentu yang memungkinkan seorang kader dapat mengembangkan potensi akal, kemampuan fisik, dan moral sosialnya.¹ Sehingga, kader dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita yang diidealkan, nilai-nilai yang diyakini serta misi perjuangan yang diemban.

¹ Muhammad AS.Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.1996, h.120

Pola pengkaderan yang dimaksud pada penelitian ini adalah bentuk pengkaderan yang menjadi standar bagi DPC PKB Kota Palembang untuk merekrut anggota baru yang berkualitas bagi DPC PKB Kota Palembang.

Partai kebangkitan bangsa yang peneliti maksud disini adalah partai kebangkitan bangsa DPC Kota Palembang. Maksud judul di atas adalah bentuk perekrutan dari anggota DPC PKB Kota Palembang dalam meningkatkan standar dari sikap berpolitik kadernya yang mencakup manajemen kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pengambilan alokasi sumber daya, pada DPC PKB Kota Palembang.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai yang tergolong partai besar yang mana dari terwujudnya era reformasi sampai saat ini ia masih ikut serta dalam pemilu, hal ini tidak lepas dari peran kaum agamawan yang ikut serta terjun berpolitik dengan mengusung visi/misi nilai-nilai keislaman. Bertahannya kekuatan partai politik islam ini menjadi tantangan tersendiri bagi para elit politik partai untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas agar partai tersebut bisa bertahan dan tetap eksis.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Partai politik pada idealnya menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi rakyat dalam menjembatani kepentingan rakyat. Ada sebuah kenyataan bahwa fakta yang terjadi di Indonesia banyak dari partai politik mengabaikan proses kaderisasi dan perekrutan basis massa dengan proses dan mekanisme organisasi, dimana keberadaan partai politik hanya bisa dilihat dan dirasakan pada saat momentum perebutan kekuasaan (pemilu) semata, itu pun partai politik sering kali

menggunakan cara-cara instan dalam mengarahkan masyarakat untuk bisa mendukung partai politik tersebut hanya untuk mendapatkan suara pada saat pemilu (aksidental). Sehingga “simpatisan” atau “kader” partai politik tidak pernah merasakan pembinaan dan tidak melewati pola pengkaderan yang seharusnya dilakukan oleh partai politik.

Idealnya partai politik mempunyai sebuah nilai atau prosedur baku dalam merekrut kader dan massa. Kader ataupun massa merupakan manifestasi atau wajah dari identitas sebuah partai politik. Partai politik secara teoritis harus mewakili dan mereferentasikan kepentingan rakyat dan itu tercermin dari landasan dan tujuan awal terbentuknya partai (*party*). Kader merupakan ujung tombak institusi partai sehingga perlu adanya upaya membakukan dan melembagakan system pengkaderan. Mulai dari rekrutmen, pendidikan, politik, dan penanaman ideology partai.

Konsekuensi system kepartaian yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem multi partai mengakibatkan banyaknya partai politik. Banyaknya partai politik ini tidak diiringi dengan kualitas yang baik. Kelahiran parpol-parpol tersebut tidak berdasarkan atau mewakili kepentingan masyarakat akan tetapi lebih pada alat untuk meraup suara dan mencapai kekuasaan.

Salah satu fakta yang mengemuka partai politik kesulitan untuk mencalonkan kader-kader mereka untuk menjadi calon legislatif atau eksekutif. Terpenuhinya kuota pencalonan tidak melalui proses kaderisasi atau nilai baku yang ada di partai. Seperti contoh banyaknya partai yang mengambil kader dari tokoh-tokoh besar yang berpengaruh lalu ditarik dan dicalonkan melalui partai

tersebut. Indikasi perekrutan kader tanpa proses dan nilai baku terlihat juga pada fenomena yang terjadi di zaman sekarang dimana partai juga banyak mengambil tokoh artis, pengusaha dan orang-orang yang berpengaruh lainnya.

Selain itu juga fenomena menarik adalah munculnya kuota 30% perempuan dalam pemilu membuat partai politik merekrut calon secara instan. Untuk itulah dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin membuktikan dan menguraikan pola pengkaderan yang ada di PKB. Sebagai partai politik yang mengimajinasikan identitas keislaman dan partai kader, menarik untuk melihat apakah sebagai sebuah organisasi atau partai politik PKB mempunyai nilai atau prosedur yang baku untuk mengatur mekanisme pengkaderan.

Maksud judul di atas adalah bentuk perekrutan dari anggota DPC PKB Kota Palembang dalam meningkatkan standar dari sikap berpolitik kadernya yang mencakup manajemen kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pengambilan alokasi sumber daya, pada DPC PKB Kota Palembang.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan dan perumusan masalah. Pada bagian ini merupakan bagian yang memberikan penjelasan tentang pembatasan dan perumusan masalah.

1. Batasan masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan teliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian²

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang jelas agar peneliti lebih terarah pada tujuan yang ingin dituangkan pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti membatasi permasalahan hanya pada pola pengkaderan DPC PKB Kota Palembang serta eksistensi kader PKB ditingkat politik lokal Kota Palembang.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi penelitian untuk penjelajahan pada objek yang diteliti.³ Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pola pengkaderan DPC PKB kota Palembang ?
2. Bagaimana eksistensi kader PKB ditingkat politik lokal Kota Palembang?

²Dadung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ombak, 2011, Hal.126.

³Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2014, Hal. 290.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa tujuan dan manfaat. Untuk apa melakukan sebuah penelitian jika tidak bermanfaat, oleh karena itu penulis membaginya menjadi dua kriteria :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam penelitian pola pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat pelembagaan partai politik dalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa, secara spesifik pengkaderan dalam partai tersebut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi kader PKB ditingkat politik lokal Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, wawasan hazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi prodi Politik Islam.

- b. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi civitas akademika (mahasiswa dan dosen) dan bagi peneliti berikutnya di bidang politik Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian yang telah ada sebelumnya maka perlu ada upaya untuk meninjau beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang relevan dan mempunyai kesamaan diantaranya adalah:

Salah satu Penelitian yang dilakukan oleh Beni Azhar Assadan menggambarkan tentang pola kaderisasi yang diabaikan yang menyebabkan banyak kader yang keluar dan berpindah ke partai lain. Kader sebagai aktor utama regenerasi kepemimpinan tidak lagi diperhatikan bahkan terkesan diabaikan oleh pemimpin partai. Hal inilah yang menyebabkan banyak kader dalam tubuh partai memilih untuk keluar atau berpindah menjadi anggota partai politik lain yang dapat menerima dan mementingkan keberadaan kadernya.

Keluarnya kader Yuddy Chrisnandi merupakan sikap kekecewaannya karena tidak terpilih sebagai calon ketua umum Golkar. Keluarnya Lily Chadidjah Wahid di DPP PKB merupakan bentuk otoritarianisme DPP PKB terhadap Lily sebagai kader PKB yang tidak terkena kasus hukum. Lily memilih bergabung bersama Partai Hanura yang dianggap relatif bersih dari partai lain. Dan keluarnya Patrice Rio Capellla disebabkan karena partai terdahulunya yakni

Partai Amanat Nasional (PAN) dianggap tidak lagi reformis dan memilih mendirikan partai baru⁴

Skripsi yang berjudul “Pendidikan Politik Partai NasDem Sebagai Strategi Dalam Pembinaan Kader”, yang ditulis oleh Desi Elista Jurusan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara. Skripsi ini menyoroti tentang NasDem dalam memberi pendidikan politik untuk pembinaan kader di Kota Bengkulu.

Karya ilmiah yang berjudul “Manajemen Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPW Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan pendidikan politik calon anggota legislatif” yang ditulis oleh Abdul Hadi Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi ini menyoroti tentang telaah perencanaan serta pengawasan dari sistem manajemen PKB DPW DIY.

Karya ilmiah yang berjudul “Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrat *Study* Pelaksanaan Pemilu 2009 karya Ikhwanudin, hanya terfokus kepada bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat kepada para kadernya pada pemilu legislatif tahun 2009. Isi karya ilmiah ini terfokus kepada pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai yang bersifat eksklusif dan formalitas untuk para kadernya saja.

Berdasarkan tinjauan terhadap kajian terdahulu, persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang partai politik, pola pengkaderan dan pendidikan di dalam partai politik. Sehingga referensi tersebut dapat membantu penulis dalam

⁴Beni Azhar Assadan. Partai Politik dan Kaderisasi Politik: Studi Kasus Yuddy Chrisnandi, Lily Chadidjah Wahid, dan Patrice Rio Capella. (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 60

menyelesaikan penelitiannya. Karena sistem pembahasannya hampir sama dengan penulis.

Perbedaan antara penelitian terdahulu terletak pada objek, lokasi dan pengaruh penelitiannya. Objek penelitian ini dikantor pengurus cabang partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang, penelitian ini lebih menfokuskan tentang pola pengkaderan partai, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pelebagaan partai politik yang dikemukakan Randal dan Svasand.

E. Kerangka Teori

Untuk membantu dan membentuk pola pikir dalam proses analisis skripsi ini menggunakan teori, antara lain sebagai berikut :

1. Pelebagaan Partai Politik

Menindak lanjuti kepengaruhan partai politik ini Randal dan Svasand berpendapat bahwa hal semacam itu dapat dilacak melalui dinamika internal partai, dan keberagaman kepentingan aktor di dalam organisasi partai sebagai tempat analisa. Dengan kata lain, yang mendapat perhatian adalah kelembagaan partai itu sendiri yang menyilangkan aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural.⁵ Sebab, pelebagaan partai politik ini menjadi cerminan bagaimana partai politik bertindak dalam upaya menyentuh persoalan-persoalan dalam organisasi partai sehingga dapat diharapkan dapat langsung menuju pada sumbernya.

⁵Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Intitutionalization in New Democracies," Jurnal Party Politics Vol. 8 No 1 (2002), 5-29.

Untuk menyederhanakan pelebagaan partai politik Randal dan Svasand ini dengan menggunakan istilah ‘dalam’ dan ‘luar’. Istilah ‘dalam’ merujuk pada derajat kesisteman (*systemness*) dan derajat identitas nilai (*value infusion*). Dalam derajat kesisteman ini dilihat sebagai proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik (seperti komunikasi, rekrutmen, sosialisasi, termasuk manajemen konflik) dilakukan menurut aturan, dan konvensi bersama yang dilegitimasikan dalam AD/ART partai politik.

Sementara itu, derajat identitas nilai di mana partai politik bertindak sesuai segi sifat maupun orientasinya. Oleh karena itu, baik organisasi kepartaian, strategi, program partai politik diturunkan dari sifat maupun orientasinya serta pembilahan sosial dari kelompok-kelompok pendukung utama di dalam partai. Misalnya, dapat dilihat dari pengakategorian partai sebagai partai lindungan (*patronage party*) dengan partai ideologi (*pragmatic party*). Adapun partai lindungan umunya memiliki pengoperasional yang lemah. Sebab, tujuan utama dari partai ini yaitu untuk memenangkan pemilu untuk anggota-anggotanya yang dicalonkan.

	Internal	Eksternal
Struktural	<i>Sytemness</i>	<i>Decisional</i>
<i>Attitudinal</i>	<i>Value infusion</i>	<i>Reification</i>

Gambar 1. Dimensi pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand⁶

⁶Vicky Randall dan Lars Svasand, “*Party Institutionalization in New Democracies*,” Jurnal Party Politics Vol. 8 No 1 (2002), 5-29.

Maka dari itu, kegiatan partai ini terlihat menjelang dilaksanakannya pemilu dengan berbagai kegiatan lainnya guna menarik simpati masyarakat. Sedangkan dalam partai ideologi mempunyai pandangan yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengingat (seperti nasionalis, agamis, sosialis). Bisa jadi, didalam partai model ini diadakan peanyaringan terhadap calon-calon yang ketat untuk keberlangsungan partai.⁷ Dengan demikian, adanya keyakinan yang dipegang partai politik dalam sifat maupun orientasinya memperlihatkan dua tindakan yang diambil yakni siap berkompetisi dan merepresentasikan kepentingan.

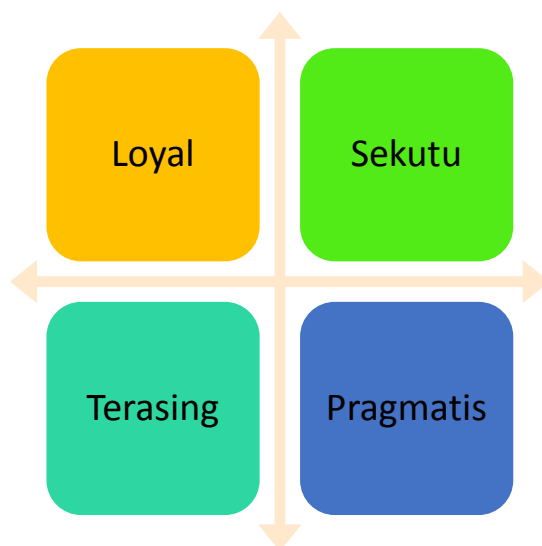
Kemudian peristilahan yang kedua dari kelembagan politik Randall dan Svasand, yaitu 'luar' mewakili derajat otonomi dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) dan derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*). Dalam pembuatan keputusan, partai politik setidaknya berperan sebagai sarana pembuatan kebijakan. Maksudnya, hal tersebut dapat terjadi apabila partai politik tersebut berkuasa dan memegang tampuk pemerintahan dalam suatu negara. Berbeda hal apabila partai tersebut berperan sebagai oposisi, maka partai politik itu jelas tidak berfungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan, tetapi sebagai pengendali dan pelaksana kebijakan yang dibuat partai yang berkuasa.

Sedangkan, dalam citra publik partai politik merupakan dimensi yang menghubungkan pemilih dan partai politik. Identifikasi diri dengan partai (*party*) dapat dikatakan sebagai perasaan seseorang manusia bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya, bahwa seorang tersebut mengidentikan diri sebagai

⁷ Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 166-167

orang partai tertentu, atau bahwa seseorang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Misalnya: Saya orang Golkar, saya merasa dekat dengan PDI Perjuangan, dan seterusnya. *Party* ini merupakan komponen psikologis yang memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian, dan pada akhirnya memperkuat demokrasi itu sendiri.

Kemudian, citra publik juga dapat dilihat dari intermediasi partai atau evaluasi kelompok pemilih sejauh mana partai politik dirasakan berfungsi menghubungkan kepentingan kelompok pemilih dengan keputusan-keputusan publik yang bakal dibuat dalam regulasi di parlemen ataupun keputusan pemerintah. Bila evaluasi ini sebagian besar negatif, maka fungsi intermediasi itu lemah, dan sebaliknya fungsi tersebut kuat. Dengan kata lain, keseluruhan dari citra publik ini dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Sumber: Biorcio dan Mannheim⁸

⁸.R. Biorci dan R. Mannheim, "Relationship Between Citizens and Political Parties" dalam H-D Klingemann dan D. Fuchs, *Citizens and State* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 206-226.

Dari bagan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa, sumbu vertikal menunjuk *Party*, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan intermediasi. Misalnya untuk sekutu, hubungan antara partai dan kelompok pemilih memenuhi dua dimensi (afeksi dan rasionalitas). Kelompok pemilih punya hubungan emosional dengan partai, dan hubungan rasional. Hubungan antara dua belah pihak sangat kuat dan positif. Implikasinya, pemilih menjadi optimis dan partai politik menjadi berakar dan karena itu menjadi kuat.

Sementara itu, dalam hubungan loyal antara partai dan kelompok pemilih hanya bersandar pada hubungan emosional. Dimensi rasionalitas atau intermediasi-nya lemah atau tidak ada. Kemungkinan besar membantu stabilitas dukungan pada partai meskipun partai tidak berfungsi bagi kepentingan pemilih. Dalam tipe ini, elite partai punya pengaruh sangat kuat tanpa kontrol berarti dari pemilih. Hubungan ketiga yaitu terasing di mana emosional maupun rasional antara pemilih dan partai lemah atau bahkan tidak ada.

Partai adalah sesuatu yang asing bagi kelompok pemilih, dan partai tidak dirasakan gunanya oleh mereka. Tipe hubungan ini paling buruk bagi partai, bagi sistem kepartaian, dan bagi demokrasi perwakilan. Bila tipe ini merupakan kekuatan mayoritas, menjadi ancaman nyata bagi partai, sistem kepartaian, dan demokrasi perwakilan. Terakhir hubungan pragmatis antara kelompok pemilih dan partai ditandai oleh hadir atau kuatnya fungsi intermediasi partai.

Ditingkat pemilih partai dirasakan menjadi penghubung kepentingan mereka dengan keputusan-keputusan politik yang dibuat diparlemen ataupun eksekutif. Namun demikian, hubungan tersebut tidak disertai loyalitas terhadap

partai politik. Mereka mendukung partai sejauh partai tersebut berfungsi untuk memperantarai kepentingan mereka. Bila kepentingan tersebut tak dimediasi maka pemilih meninggalkan partai tersebut. Karena dalam prakteknya tidak mudah peran intermediasi ini dimainkan oleh partai, dan tidak mudah semua kepentingan pemilih diakomodasi, maka pola hubungan pragmatis ini cenderung cair, mudah berubah, dan karena itu tidak mudah bagi stabilnya dukungan terhadap partai, bagi stabilitas sistem kepartaian, dan bagi stabilitas demokrasi itu sendiri.

Dari kelembagaan politik dari yang di lihat dari ‘luar’ ini seolah dapat dikontekskan dengan teori wajah partai Katz dan Mair di mana partai politik memiliki perannya masing-masing sesuai konteks berada, seperti partai dihadapan para pemilih (memobilisasi rakyat untuk berpartisipasi politik), partai sebagai organisasi (melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya), dan partai di pemerintah (artikulasi kepentingan dalam kebijakan publik).⁹ Disisi lain, teori kelembagaan partai politik Randall dan Svasand juga relevan jika diaplikasikan dalam sistem kepartaian di Indonesia yang notabennya multipartaidi mana justru dapat menciptakan persatuan, kesatuan dan stabilitas nasional sehingga meminimalisir berbagai konflik yang timbul pada sebelum, saat, dan pasca pemilu.

⁹I Ketut Putra Erawan, “*Mission Impossible?: Reformasi Kepartaian di Indonesia*,” Jurnal Dinamika Masyarakat Vol.IV, No. 1 (2005), 660.

adanya kelembagaan partai politik ini juga ‘seolah-olah’ menjawab persoalan partai di mana tidak lagi terkungkung dalam pertanyaan apa adanya partai, melainkan apa yang seharusnya ada di partai tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan riset dalam penelitian ini sebagaimana yang diajukan dalam rumusan masalah maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memahami, memberikan tafsir pada fenomena yang ada di partai kebangkitan bangsa baik dalam bentuk informasi personal dari narasumber yang menjadi pengurus aktif di PKB maupun dari data tertulis atau data lainnya. Dalam penelitian kualitatif, metode yang bisa digunakan beragam (*multi-metode*), tergantung tujuan dan sifat penelitian.¹⁰

Menyesuaikan dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penelitian ini bersifat eksploratif. Penelitian ini mencoba mengali informasi sebanyak mungkin mengenai proses pelebagaan partai politik di tingkat lokal. Penelitian ini berdasarkan pada suatu permasalahan yang terjadi di Kota Palembang.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Palembang.

¹⁰Agus Salim (ed.), “*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, hal. 69-205

2. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap tokoh-tokoh kunci partai politik, dalam hal ini adalah pengurus aktif DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Palembang. Selain itu wawancara ini juga menurut penulis menjadi sangat penting dilakukan terhadap kandidat-kandidat yang memenangkan suara pemilihan umum di Kota Palembang terutama pemilihan umum Tahun 2014 yang lalu, serta kandidat-kandidat yang akan mencalonkan diri di pemilihan umum Tahun 2019 hal ini dilakukan karena mereka adalah selain mereka sebagai peserta dari kontestasi pemilihan umum itu, disisi lain juga mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dengan partai politik pengusung, sehingga pernyataan-pernyataan mereka diharapkan mampu menjadi salah satu basis argumentasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan dan sebagainya. Aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, baik secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Tujuan dari dilakukannya observasi adalah

untuk memvalidasi informasi yang dihasilkan oleh peneliti sebagai hasil dari wawancara mendalam tentang pola perkaderan di DPC PKB Kota Palembang.

3) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh banyak data dalam bentuk dokumentasi, arsip, dan laporan-laporan partai politik. Data ini meliputi Visi dan Misi partai, struktur kepengurusan partai, serta peraturan-peraturan partai seperti anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)), surat keputusan, sejarah resmi partai, platform partai serta data lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹¹

4) Teknik Literasi (Studi Kepustakaan)

Teknik ini perlu dilakukan untuk mempertajam analisis terutama sebagai perbandingan dengan data yang didapat dalam objek penelitian. Studi pustaka ini dilakukan terhadap beberapa literatur yang memberikan informasi tentang teori-teori berkenaan dengan topik penelitian.

¹¹ AD/ART partai kebangkitan bangsa hasil mukhtamar luar biasa di Ancol, Jakarta 2-4 Mei 2010

3. Teknik Analisa Data

Temuan dalam penelitian ini di analisis dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman¹² yang terdiri dari tiga komponen analisis, sebagai berikut:

Pertama, Reduksi data, dalam reduksi data ini data yang diperoleh dari objek penelitian yakni DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang akan dituangkan dalam laporan yang lengkap, laporan lengkap tersebut di dapat dari wawancara mendalam terhadap pengurus aktif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang.

Selain itu juga data dari wawancara dengan Anggota Dewan yang duduk di DPRD Kota Palembang yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Laporan data juga didapat dari data AD/ART partai, dan data partai lainnya. setelah direduksi dan dirangkum dan kemudian dipilih untuk mendapatkan data pokok yang menjadi fokus penelitian yakni ingin melihat pelebagaan partai PKB di Kota Palembang dan korelasi dari pelebagaan partai politik tersebut terhadap stabilitas elektoral di pemilihan umum. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah menganalisis data sesuai dengan tema dan desain penelitian yang ditetapkan.

Kedua, Penyajian Data, penyajian data ini adalah proses dimana data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis. Penyajian data ini dilakukan

¹²Sugiono. "Memahami Penelitian Kualitatif". (Bandung: Alfabeta,2013) hal.

dalam bentuk tabel, gambar, grafik, data narasi, uraian, dan bagan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis memahami gambaran dari Pelembagaan Partai Politik yang ada didalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang, dan korelasinya dengan stabilitas elektoral partai tersebut dalam pemilihan umum.

Ketiga, Kesimpulan Verifikasi, kesimpulan verifikasi dimaksudkan sebagai proses kegiatan verifikasi yang dilakukan sejak awal penelitian baik pada saat datang ke lokasi penelitian (DPC PKB Kota Palembang) selama pengumpulan data hingga proses penyusunan hasil penelitian. Data yang telah disajikan kemudian dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan jawaban akhir atas rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan sistematika penulisan berdasarkan alur argumen berurutan dan jelas yang disesuaikan dengan kerangka utamanya yakni untuk melihat pola pengkaderan PKB studi kasus dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kota Palembang. Lebih jelasnya berikut sistematika bab-bab yang akan disajikan.

Pada Bab I peneliti akan memaparkan berbagai macam penjelasan dalam pendahuluan yakni **penegasan judul**, latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah tersebut dalam **identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustakan serta kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.**

Khusus metode penelitian: dalam metode ini akan dijelaskan jenis penelitian, unit analisa, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Selanjutnya dalam Bab II peneliti ini akan mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, sejarah partai PKB nasional dan lokal, tujuan visi misi asas dan prinsip perjuangan partai serta struktur partai DPC PKB Kota Palembang.

Bab berikutnya yakni Bab III, penelitian dan pembahasan. Berisikan deskripsi hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang telah ditetapkan, analisa data dan hasil temuan dalam bab ini dikemukakan berkaitan dengan persoalan pokok yang dikaji, pola pengkaderan partai kebangkitan bangsa serta dinamika politik lokal yang ada di kota Palembang.

Bab berikutnya yakni Bab IV, penutup dan kesimpulan serta saran

BAB II

SEJARAH DAN AD/ART PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

A. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa Nasional Dan Lokal

Pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa bermula sejak lengsernya jabatan Presiden Soeharto sebagai Pemimpin Bangsa dan Negara Indonesia, Sejak itulah maka berakhirilah era Orde Baru Pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah berakhirnya Orde Baru kebebasan terbuka kembali dan kemudian Partai Kebangkitan Bangsa dideklarasikan pada tanggal 23 juli 1998 di kediaman H. Abdurrahman Wahid, Cianjur, Jakarta Selatan. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia yang kemudian disebut era reformasi.¹³

Jadi awal pembentukan PKB dimulai pada lengsernya Soeharto pada masa orde baru karena pada masa orde baru banyak masyarakat yang dirampas haknya, mulai dari hak mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih, dan hak untuk menjamin keselamatan. Oleh karena itu, belum lama Soeharto lengser NU banyak mendapatkan usulan dari masyarakat agar NU menjadi partai atau NU mendirikan partai untuk menampung aspirasi masyarakat.

Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan

¹³Partai Kebangkitan Bangsa, (*Dokumen Historis Pendirian PKB*, Jakarta: DPP PKB, 1999), h.11.

agar PBNU membentuk parpol, dan ada juga yang mengusulkan agar NU menjadi parpol. Namun inti dari usulan tersebut adalah agar PBNU membantu mewujudkan adanya satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU.

Dari PBNU inilah partai PKB dibentuk dengan usulan masyarakat yang ingin bebas, bahagia, serta bisa mengeluarkan aspirasinya kepada pemerintah. Agar masyarakat bisa mencapai kebahagiaan dan ketenteraman, baik di bidang ekonomi, budaya, politik, dan agama di Negara Indonesia. Oleh sebab itulah NU memikirkan pembentukan partai baru agar bisa mendapatkan masyarakat yang diinginkan.

Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisasi NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (perkanu) di Cirebon.¹⁴

Nadhlatul ulama (NU) tidak melakukan kegiatan politik praktis, oleh karena itu Nadhlatul Ulama mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

¹⁴Abdurrahman Wahid, (*Dokumen Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa*, Ciganjur: 1998), h.21.

untuk menampung aspirasi rakyat. Menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah melalui politik praktisnya agar tercapainya kerukunan masyarakat khususnya masyarakat yang beragam.

Setelah melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam anwar (katib Aam PBNU) Dr. KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.e., M.Sc. (ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisasi, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.¹⁵

Pengurus besar Nadhlatul Ulama (PBNU) mengadakan rapat untuk mendirikan partai yang cocok untuk NU khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, dimana masyarakat Indonesia yang majemuk dan sangat beragam maka Nadhlatul Ulama (NU) harus hati-hati mendirikan partai agar dapat diterima dan berguna bagi masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H

¹⁵*Ibid.*, h.21

Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri thata Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. HAndi Muarli Sunrawa, H.m.Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Dari rapat harian ini, terbentuklah Tim atau kelompok-kelompok yang mempunyai tugas masing-masing untuk membantu masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya melalui partai politik yang akan dibentuk. Partai baru yang bisa diterima oleh masyarakat beragam atau majemuk di Indonesia maka Nadhlatul Ulama (NU) bekerja Ekstra dan hati-hati agar keinginan masyarakat terpenuhi.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan Konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: pokok-pokok pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siasyah, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD ART dan Naskah Deklarasi.¹⁶

Hasil dari kelompok-kelompok yang bertugas, mendapatkan rancangan pokok berdirinya partai dan partai yang diharapkan. Dalam era reformasi politik pertimbangan untuk mendirikan partai sangat diperhatikan, itu terbukti dalam

¹⁶Partai Kebangkitan Bangsa, *opcit.*,h.13.

pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir batin, material maupun spiritual dan mewujudkan tatanan politik yang demokratis, bersih dan terbuka serta ber-akhlakul karimah.

Akhirnya parpol yang diharapkan dapat menampung aspirasi Indonesia, yang diberikan nama Partai Kebangkitan Bangsa, pada tanggal 23 juli 1998, dideklarasikan. Sesuai dengan yang diharapkan NU dan juga Bangsa Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa diharapkan dapat bersama komponen bangsa lainnya membangun masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa.

Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai yang didukung oleh elit-elit organisasi sosial keagamaan NU serta didukung secara cultural oleh jami'iyah NU untuk menyikapi munculnya era Reformasi. Meskipun berdirinya PKB yang dibidani dan difasilitasi oleh PBNU telah menyebabkan berbagai macam konflik internal dalam organisasi NU, apalagi setelah PKB menyatakan diri sebagai partai terbuka dan inklusif, tetapi pada elit NU menyatakan PKB bukanlah partai Islam sebab PKB tidak mencantumkan asas Islam dalam anggaran dasarnya melainkan mencantumkan Pancasila.

PKB adalah partai nasionalis yang ingin memperjuangkan bangsa dan Negara. Ia menyadari bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu bangsa yang merdeka,bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia.¹⁷

Bahwa wujud dari bangsa yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran kebenaran, dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong-menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis / ketentuan yang telah disepakati bersama. PKB berpendapat, perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpecah, terjaminnya hak-hak azasi manusia, dan lestarnya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai terbuka diawali oleh usulan warga NU untuk membentuk sebuah wadah agar aspirasi masyarakat dapat diterima oleh pemerintah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh Nadhlatul Ulama dengan pengamatan dan pemikiran yang panjang, akhirnya partai yang diharapkan berdiri di ciganjur. Walaupun didirikan oleh organisasi islam terbesar di Indonesia tetapi Partai Kebangkitan Bangsa bukan partai islam melainkan partai terbuka, melihat masyarakat Indonesia yang pluralis atau

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemennya*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2006),h.107.

beragam.

Untuk itu dalam perkembangan PKB sangat tepat untuk dikaji lebih dalam agar mendapatkan masyarakat yang di cita-citakan oleh PKB itu sendiri dan bangsa Indonesia dapat terwujud.

B. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Pengurus Cabang Kota Palembang

Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai yang masih eksis di Indonesia sampai saat ini. Pada saat lahirnya tanggal 23 juli tahun 1998 di Sumatera Selatan, PKB telah menegaskan dirinya sebagai partai politik yang terbuka, tidak sectarian dan modern, sebagai penyalur aspirasi politik masyarakat di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia umumnya.¹⁸

Karakter partai sedemikian adalah postur partai sejati yang benar-benar dibutuhkan kiprahnya oleh masyarakat Palembang dan seluruh rakyat Indonesia dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingannya untuk ditrasformasikan oleh pihak pemerintah dalam bentuk kebijakan publik yang aspiratif.

Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa merupakan wadah sebagai penyalur aspirasi masyarakat Palembang untuk ikut serta tanggung jawab,

¹⁸Sutami Ismail S.Ag, Ketua Dewan pengurus cabang (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara*, Tangga 13 Juni 2019

bersatu, bahu membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan masyarakat yang adil, makmur, cerdas, berkualitas, serta damai melalui garis perjuangan partai politik.¹⁹

Masyarakat Palembang sangat beragam, mulai dari Suku, Bahasa, Agama, dan Budaya masyarakat yang pluralisme, oleh karena itu tantangan masa depan demokrasi di Kota Palembang khususnya, di Indonesia umumnya ialah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan yang sangat beragam di Palembang tetap bersatu, berakhlak baik, makmur, cerdas dan berkualitas.²⁰

Dalam hal ini PKB sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban di Palembang agar masyarakat yang dibentuk sesuai harapan dan berakhlak baik. Dengan penduduk yang banyak di Palembang dan berbagai macam ragamnya, PKB harus tetap menjaga agar masyarakat yang beragam di Palembang tetap bersatu, berakhlak baik, makmur, cerdas dan berkualitas.

Artinya, dalam perkembangannya Partai Kebangkitan Bangsa memperjuangkan sistem pendidikan masyarakat Kota Palembang agar bebas dari bentuk penindasan. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Kota Palembang harus berorientasi kebangsaan, kerakyatan, murah dan berkesinambungan serta dijiwai oleh semangat pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Peran politik masyarakat Kota Palembang adalah agar menjadi warga

¹⁹Sutami Ismail S.Ag, Ketua Dewan pengurus cabang (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2019

²⁰Sutami Ismail S.Ag, Ketua Dewan pengurus cabang (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2019

Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maksudnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai penyalur aspirasi masyarakat Kota Palembang, memerlukan perjuangan agar masyarakat yang di cita-citakan terwujud, melalui azas perjuangan PKB maka masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan damai akan tercapai.

Keberagaman agama masyarakat Kota Palembang sangat banyak, Agama mayoritas adalah Islam. Selain itu terdapat pula penganut Khatolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu, kesimpulannya, Penduduk Kota Palembang merupakan penganut beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.

Di Kota Palembang terdapat beberapa tempat ibadah dari agama-agama tersebut. Tempat-tempat ibadah tersebut antara lain Masjid, Mushollah, Gereja, Vihara, Pura. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus saling menghormati baik dengan sesama agama maupun dengan agama lainnya, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita menjadi saling memusuhi.

Dalam keberagaman agama inilah PKB sebagai partai terbuka yang menerima seluruh masyarakat tanpa membedakan Suku, Ras, agama harus dipertahankan. Karna untuk tercapainya demokrasi yang dicita-citakan dan untuk mencapai azas perjuangan PKB, keberagaman itu harus selalu ada dan mengakui bahwa Indonesia itu beragam.

Intinya, awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Palembang itu sama dengan awal pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sumatera Selatan dan wilayah lain. Karena NU yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maka dari berbagai kota, itu sudah disiapkan oleh NU. Nahdatul Ulama adalah organisasi terbesar dan tertua di Indonesia jadi kader-kader dari berbagai daerah mudah didapat, dan Partai PKB sebelum berdiri sudah banyak pendukungnya.

Kesimpulannya, Partai Kebangkitan Bangsa dalam perkembangannya memerlukan keanggotaan, pendukung, dan kegiatan. Seperti yang penulis uraikan di atas bahwa, untuk mendapatkan pendukung yang banyak partai kebangkitan bangsa harus melakukan kegiatan, kegiatan itu dilakukan oleh anggota, dan dalam pelaksanaan kegiatan harus dapat diterima oleh masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap partai itu tetap terjaga.

C. Tujuan Partai Kebangkitan Bangsa

Tujuan Partai Kebangkitan Bangsa adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.²¹

²¹AD/ART partai kebangkitan bangsa hasil mukhtamar luar biasa di Ancol, Jakarta 2-4 Mei 2008

D. Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Visi Partai Kebangkitan Bangsa

Terwujudnya masyarakat yang terjamin hak asasi manusianya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujurannya, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani, dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampumemecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebijakan serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial yang menetapkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga Negara didepan hukum.

Artinya, visi partai kebangkitan bangsa dalam perkembangannya adalah mewujudkan massyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Agar visi partai kebangkitan bangsa itu tercapai dengan harapan yang dicita-citakan, maka perkembangan yang dilakukan harus berjalan dengan baik.

2. Misi Partai Kebangkitan Bangsa

Misi didalam partai kebangkitan bangsa terdiri dari berbagai bidang yaitu bidang agama, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, dan bidang pertahanan. Pada Bidang Agama Partai Kebangkitan Bangsa ini meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bidang Politik: Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan kedamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang abadi, adil, dan demokratis.

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa, Indonesia itu sangat beragam Agamanya, dari keberagaman itu partai Kebangkitan Bangsa harus mempertahankan keberagaman agama khususnya di Kota Palembang dan selalu menjaga hubungan baik antara agama satu dengan agama lainnya.

Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa ingin Menegakkan mental dan pendidikan di Kota Palembang khususnya agar terciptanya masyarakat yang ber SDM unggul di Kota Palembang khususnya di Indonesia dapat diperhatikan agar ekonomi masyarakat stabil dan berkembang.

Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. artinya partai kebangkitan bangsa ingin masyarakat kota Palembang memiliki ekonomi yang stabil untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik individual, kelompok dan untuk masyarakat luas

Bidang Hukum: Berusaha menegakkan dan mengembangkan Negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.

Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Artinya dalam bidang hukum dan sosial, Partai Kebangkitan Bangsa ingin menegakkan hukum yang adil di dalam masyarakat yang pluralism, baik di Kota Palembang maupun di Indonesia. Karena saat ini penegakkan hukum belum terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti, korupsi masih banyak di Indonesia akibatnya masyarakat yang dirugikan, kejahatan, penganiayaan/kekerasan yang selalu ada dimana-mana. Sedangkan pemberdayaan budaya lokal di Indonesia belum mendapat perhatian khusus, seperti, masih ada budaya-budaya Indonesia yang tidak dilestarikan akibatnya Negara lain ingin mengambilnya.

Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, propesional, dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya system pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

Artinya pendidikan Indonesia saat ini belum merata, antara di Kota dengan di Desa dan pasilitas guru yang masih banyak kekurangan akibatnya pendidikan yang dijalankan di Indonesia belum tercapai. Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga penerus generasi mudah putus sekolah karena biaya.

Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga Negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan Negara, mendorong

terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

Dalam bidang pertahanan disini dapat dilihat bahwa Indonesia sekarang sangat lemah, belum terjaminnya hak-hak masyarakat yang menimbulkan rasa tidak aman, hak atas tempat tinggal yang masih banyak diambil oleh pemerintah, terlebih lagi wilayah Indonesia yang sering terancam untuk diambil oleh Negara lain.

Wujud dari bangsa yang di cita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi(al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga Negara didepan hukum (al-musawarah) adalah prinsip dasar dasar yang harus ditegakkan.²²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, misi yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera Lahir dan Batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya, yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya

²²AD/ART partai kebangkitan bangsa hasil mukhtamar luar biasa di Ancol, Jakarta 2-4 Mei

kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan.

Terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama, terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat, terpeliharanya harta benda. Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

E. Asas dan Perjuangan PKB

Dalam asas dan perjuangan PKB disebutkan bahwa partai ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dua tokoh terkemuka pada saat itu, KH. Abdurrahman Wahid dan juga Matori Abdul Jalil, secara terbuka dan blak-blakan menyatakan bahwa PKB bukanlah partai Islam, tetapi partai yang menginginkan berdirinya Negara sekuler karena melihat kemajemukan bangsa dan Negara Indonesia.

Jadi dari awal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperjuangkan kemajuan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui hukum Islam masyarakat yang dibangun mempunyai akhlak mulia yang mengerti satu sama lainnya, dan mengerti arti toleransi agama satu dengan agama lain agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh.

Artinya perjuangan PKB terhadap hukum Islam bukan hanya dalam masalah politik, akan tetapi menegakkan moralitas dan akhlak bangsa. PKB hanya ingin memperjuangkan nilai-nilai universal islam seperti nilai kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan sebagai cita-cita politiknya.

F. Prinsip Dasar Perjuangan PKB

Prinsip dasar perjuangan PKB terdiri dari 10 (sepuluh) prinsip yang akan di jelaskan di bawah ini.

1. PKB bertumpuh pada nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi dan dipadukan dengan nilai-nilai kebenaran, kebebasan, keterbukaan, kemerdekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. PKB merupakan parpol yang menjunjung tinggi etika dan moralitas, agar dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang manusiawi dan beradab.
3. PKB merupakan parpol yang mengakui dan menjaga kemajemukan bangsa dalam berbagai aspeknya.
4. PKB adalah parpol yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
5. PKB adalah parpol yang memperjuangkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh rakyat.

6. PKB adalah parpol yang berkehendak menciptakan masyarakat yang terbuka, mandiri serta kuat berdasarkan persatuan dan persaudaraan.
7. PKB memperjuangkan supremasi hukum dan HAM.
8. PKB menolak secara tegas kekerasan, diskriminasi, dalam segala bentuk dan manifestasinya.
9. PKB berjuang menciptakan kemandirian rakyat yang bertumpuh pada kekuatan sumber daya alam, pertanian dan maritime.
10. PKB mempunyai kepedulian yang mendalam pada persoalan-persoalan dunia yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

Kesimpulannya, Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang mempunyai kepedulian yang mendalam pada persoalan-persoalan dunia yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi manusia. Memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Seperti, nilai kebenaran, kejujuran, adil beradab, kebebasan, keterbukaan, dan persaudaraan serta menjunjung tinggi etika dan moralitas bangsa.

Dari tujuan, visi dan misi serta asas perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, maka partai ini termasuk partai modern yang bersifat inklusif pada watak para pendirinya. Selain itu, partai kebangkitan bangsa adalah partai modernis yang mempunyai pemahaman agama yang egaliter, tidak menggunakan symbol-simbol agama tertentu, tidak mau memperjuangkan

formalisasi syari'at islam demi tegaknya Negara Islam. Keanggotaan partai terbuka serta mempunyai program-program yang tidak menggunakan simbol dan nama-nama Islam.

G. Struktur Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Pengurus Cabang PKB

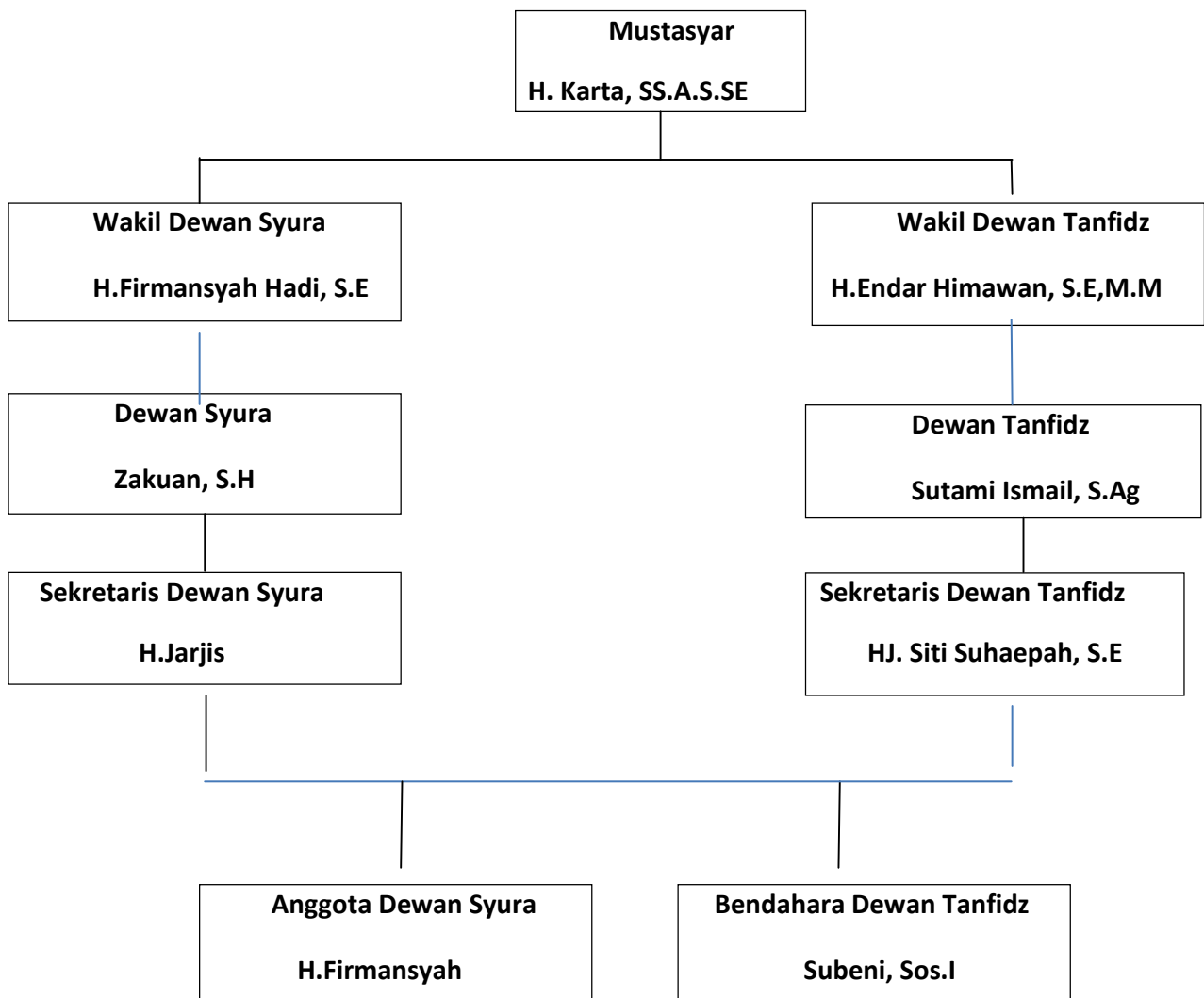
Kota Palembang

Didalam suatu organisasi tentu memiliki struktur organisasi, begitu juga partai kebangkitan bangsa di Dewan Pengurus Cabang Kota Palembang. Dibawah ini akan diuraikan dan di jelaskan struktur organisasi partai kebangkitan bangsa sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DPC PKB

KOTA PALEMBANG



Pembagian tugas dari struktur organisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan dijelaskan sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	KET/FUNGSI
1	MUKTASYAR	Mengawasi Dewan Syura dalam melaksanakan kegiatan partai
2	DEWAN SYURA	Dewan pimpinan partai yang membuat dan menetapkan kebijakan umum partai
3	WAKIL DEWAN SYURA	Membantu tugas-tugas ketua dan melaksanakannya dengan komisi-komisi yang telah ditentukan
4	SEKRETARIS DEWAN SYURA	Mengendalikan kegiatan ketua, serta membuat perencanaan rapat-rapat yang akan dilakukan ketua.
5	KETUA DEWAN TANFIDS	Dewan tanfidz bertugas memimpin dan mengendalikan organisasi partai setiap hari
6	WAKIL KETUA DEWAN TANFIDS	Membantu melaksanakan tugas harian dan melaporkan tugas pengawasan kepada ketua.
7	SEKRETARIS DEWAN TANFIDS	membantu mengerakkan kegiatan, dan memecahkan masalah yang timbul dalam partai

8	BENDAHARA DEWAN TANFIDS	mengerakkan semua aktifitas pada bagian keuangan dan menyiapkan kebijakan dalam pelaksanaan
---	-------------------------	---

SUMBER : *Data Hasil Penelitian Tahun 2014*

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Struktur Partai Kebangkitan Bangsa bersifat Kolektif dengan bukti bahwa pimpinan dengan banyak anggota.

BAB III
PEMBAHASAN
POLA PENGKADERAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA SERTA EKSISTENSI KADER PKB DI
TINGKAT POLITIK LOKAL KOTA PALEMBANG

A. Pola Pengkaderan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang

Bentuk Pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Palembang adalah kampanye pengenalan partai baik melalui seminar partai politik, diskusi tentang partai politik serta melakukan pengkaderan. Sasaran pengkaderan DPC PKB Kota Palembang ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah terorganisir maupun bagi yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai di lapangan adalah kampanye dengan mengajak masyarakat dalam pengenalan Visi/Misi partai tersebut, Keberhasilan menarik minat masyarakat ditentukan oleh tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pengkaderan.²³

Oleh karena itu semua elemen organisasi harus bersikap untuk mendukung terselenggaranya program ini, pengoptimalan program pengkaderan dapat dibentuk melalui lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator, pengkaderan partai kebangkitan bangsa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk

²³Sangi Riswanto, Wawancara tanggal 10 September 2019

merebut masa depan. Menurut Santi Riswanto selaku Demisioner Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Palembang Pengkaderan Merupakan kegiatan rutin DPC PKB Kota Palembang guna untuk mendapatkan kader-kader yang menjadi penerus pengurus dari partai itu sendiri.²⁴

Pengkaderan merupakan proses bertahap dan terus menerus sesuai tingkatan capaian situasi dalam kebutuhan tertentu yang memungkinkan seseorang kader dapat mengembangkan potensi, akal, fisik dan moral sosialnya. Pengkaderan juga dilakukan agar menghindari terjadinya politik pragmatis serta melahirkan kader-kader yang berkulaitas itulah mengapa sangat penting diadakannya pengkaderan dalam menjaga kontinuitas atau stabilitas pada partai PKB.

Santi Riswanto mengatakan Saat ini sistem kaderisasi PKB telah dibangun secara berjenjang, terstruktur, dan sistematis sebagaimana yang tertuang pada pasal 98 AD/ART PKB yang berbunyi:

1. Rekrutmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi yang berjenjang, terstruktur dan sistematis
2. Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus partai yang hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal partai dan atau pemerintahan
3. Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisah dalam penilaian kinerja dewan pengurus partai sesuai tingkatannya.

²⁴ Ibid wawancara tanggal 10 September 2019

Pendidikan Kader Pertama (PKP) diharapkan bisa menjaga keberlangsungan dan akselerasi program perjuangan partai dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan PKB. Melalui pendidikan pemuda ini para kader diharapkan memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan partai PKB dimasyarakat serta menjunjung tinggi NKRI. Setiap kader harus mengikuti beberapa jenjang atau tahapan terlebih dahulu dimulai pemuda, menengah hingga nanti ke kader inti. Ada tiga tahap pola pengkaderan di dalam partai PKB yaitu:

1. Tingkat Dasar

Pada jenjang ini pendidikan dikhususkan untuk:

- (a) pemahaman arti berorganisasi,
- (b) menanamkan loyalitas terhadap organisasi,
- (c) memantapkan dedikasi.

Kader dasar adalah jenjang pengkaderan yang pertama dilakukan PKB, untuk mengikuti pengkaderan dasar seseorang tidak mesti harus menjadi anggota partai terlebih dahulu maksudnya seseorang tidak harus terdaftar sebagai anggota atau memiliki kartu anggota terlebih dahulu asalkan bersedia mengikuti rangkaian pengkaderan tingkat dasar sampai kegiatan berakhir.

Bentuk kegiatan dilakukan adalah memperkenalkan mabda'nya, AD/ART serta tujuan didirikan PKB. Pemahaman idealisme dan nilai-nilai PKB serta memantapkan loyalitas dan komitmen kader pada PKB, para calon kader dapat penjelasan dan doktrin bahwa PKB adalah satu-satunya partai yang harus

dipilih, Dibela dan diperjuangkan. Doktrin rela berkorban didapat para kader guna memperoleh tujuan partai.

Pendidikan politik kebangsaan calon kader akan mendapatkan teori dasar-Dasar ilmu politik, pemahaman arti Negara dan bernegara serta nilai dari pancasila serta UUD 1945. Tujuan dari kaderisasi tingkat pertama guna memperoleh kader yang mencintai Negara, bhinekatunggalika, dan partai. Kaderisasi tingkat pertama ditujukan untuk kader pemula di DPC PKB Kota Palembang serta tangga untuk mengikuti pengkaderan yang selanjutnya. Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula DPC PKB Kota Palembang.

- **2. Tingkat Menengah**

- a. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:
- b. membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai,
- c. menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi,
- d. meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi

Kaderisasi ini biasanya lebih kepada praktek dilapangan, Para kader lebih di fokuskan pada praktek. Para kader yang mengikuti kaderisasi tingkat menengah mendapat tugas dari intruktur berupa bagaimana cara memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan potensi daerah asalnya.

Kaderisasi pada jenjang ini difokuskan pada potensi alam para kader masing-masing, seperti di bidang industri serta agraris. Setelah peserta

menyelesaikan tugasnya maka kader mendapatkan pendidikan politik dari instruktur lebih dalam mengenai teori- teori politik pada lapangan serta teori politik apa yang tepat dalam mempengaruhi masyarakat serta instruktur mengajarkan bagaimana menawarkan isu-isu politik yang ditawarkan sesuai dengan jenis daerahnya.

Tujuan kaderisasi tingkat menengah adalah agar para kader nantinya dapat memahami secara jelas bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat berdasarkan daerahnya. Jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya DPC PKB Kota Palembang.

3.Tingkat lanjut

Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk:

- a) Membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual,
- b) membidik cara berpikir sistematis danstrategis,
- c) membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasinya,
- d) mendidik berpikir futuristik.

Para kader diberi pelatihan mengenai kepemimpinan serta teori kepemimpinan karena kaderisasi tingkat lanjut tidak hanya untuk para kader yang akan menjadi wakil rakyat dari PKB namun untuk menjadi elit partai. Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi DPC PKB Palembang.

B. EKSISTENSI KADER PKB DI TINGKAT POLITIK LOKAL KOTA PALEMBANG

Dari aspek sejarah kelahiran PKB memang “ disengaja” di bentuk oleh para kiai-kiai NU, untuk mewadahi aspirasi politik warga Nahdliyyin yang selama ini dibiarkan disalurkan ke mana- mana. Kesengajaan ini disadari membawa konsekuensi bahwa setelah terbentuk maka akan dilakukan upaya-upaya untuk mengandangkan aspirasi politik warga pada tempat yang lebih tepat dan bisa lebih menjamin aspirasi warga NU. Bukan hal berat bagi NU/PKB untuk memobilisasi warganya.

Mobilisasi tersebut dapat dilakukan melalui struktur yang sudah mapan, melalui simpul-simpul pondok pesantren, sekolah, rumah sakit, para kiai. Struktur partai pun mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di kota Palembang bahkan mampu menembus sampai struktur tingkat ranting/desa dan kecamatan serta kelurahan.

Kontribusi partai, sebagai bentuk perjuangan PKB terhadap pembangunan bangsa ini dapat diukur dari apa dan bagaimana landasan program yang dijalankan. Kinerja partai secara umum juga dapat dibaca dari bagaimana sumber daya partai merumuskan program-program politik tersebut secara berkelanjutan dan tidak terjebak pada politik jangka pendek. Pengurus DPC Kota Palembang juga telah merancang beberapa program kerja yang diharapkan bisa, salah satunya yakni Akademi Politik Bangsa (Akpolang). Setiap akan mengadakan kegiatan seperti ini, terlebih dahulu mereka dewan Tanfidz akan

“sowan” kepada dewan Syura selaku penentu kebijakan.²⁵

Menurut Sutami Ismail di dalam Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Palembang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memperjuangkan tegaknya ideologi partai yang berbasis kerakyatan, Pancasila, serta paham *ahlussunnah wal jamaah*. Partai tidak hanya untuk mengejar kekuasaan, tetapi bagaimana ideologi perjuangan itu bisa berjalan.²⁶

Melalui Organisasi sayap, Partai Kebangkitan Bangsa dapat mewujudkan perkembangan di Kota Palembang dan sekaligus dapat bersaing dengan partai lain yang ada di Indonesia. PKB memiliki peran strategis untuk menghadapi ketatnya persaingan pada Pemilu baik di daerah maupun di pusat. Di dalam organisasi PKB di Kota Palembang ada tiga (3) organ sayap yang merupakan ujung tombak PKB dalam berjuang di berbagai lingkup dan tingkat masyarakat baik secara konseptual, teknis dan strategis. Organisasi sayap partai kebangkitan bangsa di Palembang yaitu, Gerakan Pemuda Satu Bangsa (Garda bangsa), Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba), dan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB), berikut ini akan di paparkan satu persatu organisasi sayap partai kebangkitan bangsa.

1. Gerakan Pemuda Satu Bangsa (Garda Bangsa)

a. Sejarah Garda Bangsa

Garda Bangsa adalah Sayap Organisasi Partai Kebangkitan Bangsa,

²⁵Hasil wawancara pada tanggal 10 September 2019

²⁶Sutami ismail ketua tanfidz PKB wawancara tanggal 10 September 2019

Garda Bangsa didirikan pada tanggal 11 Maret 1999, Pendirian Garda Bangsa dimaksudkan untuk menggalang dukungan massa pemilih pemuda. Sekaligus menyiapkan politisi- politisi yang nantinya akan meneruskan regenerasi di PKB. Tetapi bukan tugas yang mudah untuk menyakinkan kepada para pemuda agar terlibat langsung dalam Parpol, khususnya yang bergelut di kampus, intelektual maupun LSM.

Dimata mereka, partai politik tak lebih dari kumpulan orang yang haus kekuasaan dan jauh dari niatan untuk memberdayakan masyarakat. Dikotomi partisan dan non-partisan terlihat begitu tajam.²⁷

Setelah abdurrahman wahid menjadi presiden Republik Indonesia, kaum muda terlibat dalam parpol semakin kuat. Perjuangan ekstra parlementer yang selama ini dipilih, dirasa sering kali terbentur tembok tebal. Sementara aliansi- aliansi taktis yang dilakukan dengan parpol maupun anggota parlemen tidak memberi jaminan bahwa isu yang diperjuangkan dapat terealisasi. Dengan faktor politik semacam itulah, yang kemudian mendorong sebagian pemuda untuk berpikir realistis.²⁸

Kesimpulannya, untuk mengembangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Garda Bangsa didirikan sebagai lembaga kepemudaan PKB, dikarenakan pada saat ini sudah terjadinya pergeseran kesadaran berpolitik anak-anak muda tersebut. Sebagian besar pengurus Garda Bangsa di semua tingkatan adalah kader-kader muda yang sebelumnya bergelut di LSM dan Ormas Kepemudaan

²⁷Bendahara DPC PKB Kota Palembang, Subeni wawancara tanggal 13 September 2019

²⁸Ketua Garda Bangsa Pandi Renaldi wawancara tanggal 13 September 2019

oleh sebab itulah untuk memperbanyak pendukung partai kebangkitan bangsa berkembang dengan mendirikan Garda Bangsa.

b. Fungsi Garda Bangsa

Fungsi Garda Bangsa adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pembukaan Undang 1945, Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, Mewujudkan kehidupan bangsa dan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Kesimpulannya, Garda Bangsa mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yang adil dan makmur, mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis, untuk mewujudkan itu semua Garda Bangsa memperbanyak kader-kader untuk siap mendukung partai kebangkitan bangsa agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik.

c. Keanggotaan Garda Bangsa

Anggota Garda Bangsa terbagi menjadi dua yaitu anggota langsung dan anggota tidak langsung yang siap memperkuat Partai Kebangkitan Bangsa sehingga PKB dapat bersaing dengan partai yang ada di Indonesia. Berikut ini penulis jelaskan anggota langsung dan anggota tidak langsung Garda Bangsa sebagai berikut :

- 1) Anggota langsung adalah setiap orang muda warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota organisasi pada Dewan Koordinasi Cabang setempat dan secara aktif melakukan tugas tugas keorganisasian serta mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.

Dalam hal ini anggota langsung garda bangsa adalah bagian dari anggota langsung Partai Kebangkitan Bangsa. Maksudnya anggota garda bangsa itu sudah masuk kedalam anggota langsung partai kebangkitan bangsa. Artinya Partai Kebangkitan Bangsa memilih langsung dari anggota partai yang sah atau anggota langsung. Untuk menjadi ketua organisasi sayap partai dan diberikan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Anggotanya juga adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa baik langsung maupun tidak langsung.

- 2) Anggota tidak langsung adalah orang muda warga negara Indonesia yang belum terdaftar secara sah menjadi Anggota pada Dewan wilayah setempat namun telah secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.
- 3) Anggota tidak langsung Garda Bangsa adalah semua Pemuda Sumatera Selatan khususnya dan Pemuda Indonesia umumnya yang mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan Garda Bangsa tetapi belum terdaftar sebagai anggota.

2. Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba)

a. Sejarah Lahirnya Gemasaba

Organisasi ini bernama Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, disingkat Gemasaba. Gemasaba merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa yang menggerakkan peduli akan perubahan dan nasib bangsa Indonesia ke depan. Mahasiswa untuk Gemasaba didirikan di Jakarta pada tanggal 05 Juni 2009, Gemasaba dideklarasikan menjadi organisasi sayap Partai Kebangkitan

Bangsa pada tanggal 05 Juni 2009.²⁹

Gemasaba mempunyai lambang berupa gambar bola dunia yang di tengahnya bertuliskan Gemasaba dan dibawahnya terdapat tulisan Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa dengan dikelilingi oleh sembilan bintang berwarna kuning dengan latar belakang warna hijau. Gemasaba dapat membentuk perwakilan di luar negeri yang pengorganisasiannya diatur oleh Pimpinan Presidium Nasional Gemasaba. Pembentukan kepengurusan Pimpinan Presidium Gemasaba pada setiap tingkatan berkoordinasi dengan Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa di tingkatan masing- masing.

Untuk pertama kalinya, kepengurusan Pimpinan Presidium Gemasaba pada tingkatan Wilayah dan Daerah dibentuk berdasarkan keputusan Pimpinan Presidium Nasional Gemasaba. Gemasaba Berasaskan Pancasila yang Berketuhanan yang Maha Esa, Jati diri Gemasaba adalah Organisasi Kader yang bersemangat gotong royong, bersih, peduli, kompeten dan berkarakter. Gemasaba bersifat kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan profesional.

Sebagai bagian dari organisasi sayap politik Partai Kebangkitan Bangsa. Gemasaba ingin menjalankan komunikasi politik dan Strategis mahasiswa Partai Kebangkitan Bangsa, Serta untuk menjalankan pendistribusi dan pelaksana kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa.

²⁹EzaTriandy,(Ketua Gemasaba),Wawancara,Tanggal1 Oktober 2019

b. Fungsi Gemasaba

Adapun fungsi Gemasaba sebagai organisasi sayap partai kebangkitan bangsa yaitu, Melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Partai Kebangkitan Bangsa serta menjaga kewibawaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kader dan pengembangan mahasiswa Partai Kebangkitan Bangsa serta melakukan komunikasi politik dengan organisasi-organisasi potensial strategis kemahasiswaan.

Melaksanakan koordinasi program dan menjalin kerjasama khusus, dengan Pimpinan Partai pada tingkatannya masing-masing. Tujuannya, Mengembangkan potensi serta menguatkan peran dan kewajiban mahasiswa agar menjadi sumber kekuatan yang nyata di dalam mewujudkan dan memantapkan perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa.

Artinya sebagai organisasi sayap partai Gemasaba berfungsi sebagai kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa pada bagian kemahasiswaan, serta mencari kader-kader yang berkualitas untuk bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan partai kebangkitan bangsa.

c. Keanggotaan Gemasaba

Di dalam organisasi sayap partai kebangkitan bangsa Gemasaba ada struktur keanggotaan, yang dimaksud dengan anggota adalah seseorang yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai pengikut dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan organisasi. Kader adalah anggota Gemasaba yang

loyalitas dan dedikasinya telah teruji serta telah lulus pendidikan dan pelatihan Gemasaba.

Anggota Gemasaba terbagi menjadi dua yaitu anggota langsung dan anggota tidak langsung yang siap memperkuat Partai Kebangkitan Bangsa sehingga PKB dapat bersaing dengan partai yang ada di Indonesia. Berikut ini penulis jelaskan anggota langsung dan anggota tidak langsung Gemasaba sebagai berikut:

- Anggota langsung adalah setiap mahasiswa warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota organisasi pada Dewan pusat, dan secara aktif melakukan tugas tugas keorganisasian serta mengikuti kegiatan- kegiatan organisasi. Dalam hal ini anggota langsung Gemasaba adalah bagian dari anggota langsung Partai Kebangkitan Bangsa. Maksudnya anggota Gemasaba itu sudah masuk kedalam anggota langsung partai kebangkitan bangsa. Artinya Partai Kebangkitan Bangsa memilih langsung dari anggota partai yang sah atau anggota langsung. Untuk menjadi ketua organisasi sayap partai dan diberikan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Anggotanya juga adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa baik langsung maupun tidaklangsung.
- Anggota tidak langsung adalah mahasiswa Indonesia yang belum terdaftar secara sah menjadi Anggota pada Dewan Pusat namun secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Anggota tidak langsung Gemasaba adalah Mahasiswa Kota Palembang khususnya dan

mahasiswa Indonesia umumnya yang mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan gemasaba tetapi belum terdaftar sebagai anggota.

Kesimpulannya organisasi sayap partai yang dibentuk PKB sesuai dengan tugasnya masing-masing. Gemasaba adalah organisasi sayap partai pada bagian kemahasiswaan, Artinya untuk memperkuat dan memperbanyak massa partai kebangkitan bangsa menggerakkan mahasiswa agar mampu mengantarkan PKB dalam mencapai cita-cita yang di inginkan.

3. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB)

a. Sejarah lahirnya PPPKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai baru diluar dugaan ternyata mampu meraih posisi tiga besar dalam PEMILU tahun 1999 setelah Golkar dan PDIP, akhirnya para kader perempuan di PKB merasa perlu membentuk wadah yang bisa menampung sekaligus mengawal, memperjuangkan dan melindungi aspirasi politik mereka. Maka berdirilah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.³⁰

Perlunya dibentuk badan otonom ini adalah berawal dari landasan realitas secara umum bahwa PKB perlu menindak lanjuti dengan mengorganisir segenap partai antara lain adalah kaum perempuan. Perempuan yang jumlahnya mencapai 55% dari pemilih nasional merupakan potensi yang besar bagi

³⁰PPKB, *Dokumen Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta : DPP PKB, 1999

tercapainya visi dan misi PKB yaitu demi tercapainya “Masyarakat Beradab dan Sejahtera”.

Artinya pergerakan perempuan kebangkitan bangsa (PPKB) didirikan setahun setelah partai kebangkitan bangsa berdiri.berdirinya PPKB karna karna jumlah perempuan yang lebih banyak dari pada laki-laki dan memperjuangkan kaum perempuan yang sering tersingkirkan dalam dunia politik.

Kekuatan perempuan dalam PKB patut diperhitungkan, mengingat pertama 75% dari pemilihnya adalah warga NU, dan lebih dari 50% warga tersebut adalah perempuan, kedua, NU memiliki organisasi kemasyarakatan Islam yang berbasis perempuan, ada Muslimat NU, Fatayat NU dan juga IPPNU, termasuk PMII atau KOPRI (perempuan PMII dalam lingkungan mahasiswa). ketiga, PPKB sebagai organisasi yang didirikan oleh ulama namun bersifat terbuka dan sangat menjunjung dan memperjuangkan pluralisme, sehingga banyak kelompok minoritas merasa menemukan tempat perlindungan dalam PPKB.³¹

PPKB melakukan upaya pemberdayaan dalam rangka mewadahi kader-kader perempuan yang potensial terutama yang ada dalam wadah organisasi dan banom NU untuk mengaktualisasikan diri dalam kancah politik bernegara. Selain itu semangat perjuangagn yang digelorakan dan sudah menjadi bagian dari semangat perempuan NU yang ada dalam PKB adalah modal utama yang tidak mungkin dinafikan, perjuangagn kuota 30% adalah bentuk formalitas yang

³¹PPKB , *Pemberdayaan Perempuan Indonesia Dalam Era Reformasi*, Jakarta, 1999

dituang dalam UU Politik, namun pada hakekatnya semangat pemberdayaan dan pelaksanaan kuota 30% sudah terlebih dahulu dilaksanakan dan difungsikan dengan mengedepankan kesetaraan gender.

Kuota 30% adalah pelengkap aturan secara legal kenegaraan untuk memperkuat gerakan dan advokasi perempuan dalam wilayah berpolitik dan bernegara, dan jabatan politik adalah salah satu dari alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya kaum wanita, bukan atas nama rakyat namun bagaimana agar perjuangan tersebut benar-benar untuk rakyat. Sebagaimana pengejawantahan dari nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Bersikap adil dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong serta konsisten terhadap garis atau ketentuan yang telah disepakati bersama.³²

Tetapi melihat realitas politik nasional peran serta partisipasi politik kaum perempuan tampak minim sekali, bahkan pada wilayah-wilayah tertentu peran kaum perempuan tidak tampak bisa dikatakan sama sekali tidak adanya peran. Sehingga hal ini sangat memprihatinkan, dimana kaum perempuan yang secara kuantitas lebih besar dari pada kaum laki-laki harus tersingkirkan secara tidak langsung dalam kancah perpolitikan nasional. Seperti kita ketahui bahwa pemahaman atas pemilihan wilayah dan domestik serta publik semakin bias dan

³²PPKB, *Pemberdayaan Perempuan Indonesia Dalam Era Reformasi*, Jakarta, 1999

hampir bisa dikatakan tidak ada celah ataupun ruang yang membedakan, karena dalam setiap permasalahan yang terkait dengan kepentingan umum secara otomatis akan menghilangkan segala macam sekat kepentingan laki-laki maupun kepentingan perempuan.³³

Kesimpulan, bahwa kaum perempuan dapat dan bisa mengambil peran dan kiprahnya dalam bidang domestik maupun publik secara bersama-sama dan langsung. Sebagaimana terdapat dalam kaum pria pada umumnya. Inilah yang menjadikan landasan bahwa perempuan harus ikut dan berpartisipasi dalam perpolitikan Negara sampai pada level pengambilan kebijakan strategi maupun non strategis.

Dalam rangka merealisasikan tujuan Dari di bentuknya PPKB yang merupakan bagian dari implementasi program PKB, secara umum PPKB merealisasikan program kongkrit untuk memberdayakan kaum perempuan yaitu dengan mengadakan seminar-seminar, diskusi, umum, atau khusus bagi pelatihan Kader yang potensial, penyuluhan tentang masalah politik bagi perempuan, dan lain sebagainya sesuai dengan tingkatan wilayah kewenangan untuk menggarap baik tingkat lokal maupun nasional.

Dari program kegiatan yang ada secara umum bertujuan membangun dan mengembangkan kader meningkatkan kapasitas kemampuan kader untuk

³³Siti Suhaepa S.E, Sekretaris Dewan pengurus cabang (PKB) Partai Kebangkitan

Bangsa, Wawancara, Tanggal 11 Oktober 2019

mempersiapkan potensi perempuan PKB menjadi pengambil keputusan dalam bidang strategi termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tingkat lokal maupun nasional.

b. Fungsi PPKB

Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) berfungsi Sebagai wadah berhimpun bagi para perempuan Indonesia tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama, dan profesi, Serta Salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil, dan partisipasi politik kaum perempuan.³⁴

Kesimpulannya, pergerakan perempuan kebangkitan bangsa (PPKB) berfungsi, menghimpun perempuan Kota Palembang khususnya dan perempuan Indonesia umumnya untuk meningkatkan pendidikan, partisipasi politik perempuan dan mendapatkan massa yang banyak untuk mendukung partai.

c. Keanggotaan PPKB

Di dalam organisasi sayap partai kebangkitan bangsa PPKB ada keanggotaan, yang dimaksud dengan anggota adalah seseorang yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai pengikut dan telah memenuhi seluruh

³⁴DPP Partai Kebangkitan Bangsa, *Peraturan Perundang-Undangan PKB*, LPP PKB,

persyaratan yang ditentukan organisasi. Kader adalah anggota PPKB yang loyalitas dan dedikasinya telah teruji serta telah lulus pendidikan dan pelatihan PPKB.

Anggota PPKB terbagi menjadi dua yaitu anggota langsung dan anggota tidak langsung yang siap memperkuat Partai Kebangkitan Bangsa sehingga PKB dapat bersaing dengan partai yang ada di Indonesia. Berikut ini penulis jelaskan anggota langsung dan anggota tidak langsung PPKB sebagai berikut :

1. Anggota langsung adalah setiap perempuan warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota organisasi pada Dewan pusat. dan secara aktif melaksanakan tugas-tugas keorganisasian serta mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi

Dalam hal ini anggota langsung PPKB adalah bagian dari anggota langsung Partai Kebangkitan Bangsa. Maksudnya anggota PPKB itu sudah masuk kedalam anggota langsung Partai Kebangkitan Bangsa.

Artinya Partai Kebangkitan Bangsa memilih langsung dari anggota partai yang sah atau anggota langsung. Untuk menjadi ketua organisasi sayap partai dan diberikan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Anggotanya juga adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa baik langsung maupun tidak langsung.

- Anggota tidak langsung adalah Perempuan Indonesia yang belum terdaftar secara sah menjadi Anggota pada Dewan Pusat namun secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.

- Anggota tidak langsung PPKB adalah Perempuan Kota Palembang khususnya dan Perempuan Indonesia umumnya yang mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan PPKB tetapi belum terdaftar sebagai anggota. Kesimpulannya organisasi sayap partai yang dibentuk PKB sesuai dengan tugasnya masing-masing. PPKB adalah organisasi sayap partai pada bagian Perempuan, Artinya untuk memperkuat dan memperbanyak massa partai kebangkitan bangsa menggerakkan perempuan Sumatera Selatan agar mampu mengantarkan PKB dalam mencapai cita-cita yang diinginkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa Pola Pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB kota Palembang meliputi tiga jenjang yaitu jenjang tingkat dasar, jenjang tingkat menengah, dan jenjang tingkat lanjut adapun penjelasan nya :

1. Jenjang Tingkat Dasar : Anggota Kader mengikuti Pendidikan Kader Pertama (PKP) dimana pada jenjang ini seseorang tidak mesti menjadi anggota partai terlebih dahulu asalkan bersedia mengikuti rangkaian pengkaderan tingkat dasar sampai kegiatan berakhir. Tujuan dari jenjang pertama ini untuk memperoleh kader yang mencintai negara, Bhineka Tunggal Ika dan Partai.
2. Jenjang Tingkat Menengah : di jenjang ini difokuskan pada praktek dilapangan dimana kader mendapat tugas dari instruktur berupa tugas bagaimana cara memperjuangkan aspirasi masyarakat.
3. Jenjang Tingkat Lanjut : di jenjang ini dimana kader diberi pelatihan tentang mengenai kepemimpinan serta teori kepemimpinan karena kaderisasi tingkat lanjut tidak hanya untuk para kader yang akan menjadi wakil rakyat dari PKB namun juga untuk menjadi elit partai. Jenjang ini diperuntukkan bagi calon calon politisi DPC PKB Kota Palembang.

Setelah para kader menjalani tahapan tahapan tersebut diatas, secara otomatis kader tersebut sudah menjadi anggota partai PKB dimana mereka berkewajiban menjalankan visi dan misi dan platform Partai Kebangkitan Bangsa dan mensosialisasikan partai Kebangkitan Bangsa kepada masyarakat luas, agar masyarakat awam lebih mengenal Partai Kebangkitan Bangsa, serta mengetahui visi dan misi Partai Kebangkitan Bangsa agar Partai Kebangkitan bangsa dapat lebih maju dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas.

Disamping itu, perkembangan yang dilakukan pada politik lokal partai yaitu dengan mengerakkan organisasi sayap partai, Organisasi Sayap Partai Kebangkitan Bangsa di Palembang ada 3 yaitu :

1. Garda Bangsa : Garda Bangsa khusus untuk pemuda-pemuda Kota Palembang.
2. Gemasaba : Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Kota Palembang.
3. PPKB : Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa khusus untuk perempuan-perempuan Kota Palembang.

Melalui sayap partai inilah semua kegiatan dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa, agar menjadi partai yang lebih besar lagi.

Dalam perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Palembang , kegiatan adalah salah satu bagian dalam perkembangan. Melakukan kegiatan keagamaan, melakukan kegiatan sosial, dan melakukan kegiatan kaderisasi

adalah cara yang dilakukan partai kebangkitan bangsa untuk dapat bersaing dengan partai di Indonesia.

Bentuk Pengkaderan masyarakat yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Palembang antara lain adalah Workshop, pendidikan kilat (diklat), seminar, dialog, kampanye pengenalan partai. Bentuk pengkaderan masyarakat yang dilakukan oleh partai Kebangkitan Bangsa di Kota Palembang telah sesuai dengan fungsinya sebagai partai politik dan sejalan dengan undang-undang yang mengamanahkan. Tetapi pengkaderan masyarakat tersebut masih membutuhkan penyempurnaan dan membutuhkan perbaikan dimasa yang akan datang karena pengkaderan yang diberikan masih bersifat formalitas saja.

B. SARAN

Saran-saran yang bisa diberikan peneliti yang bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap pola pengkaderan PKB dan politik lokal di kota Palembang. Saran-saran ini ditujukan oleh penulis kepada :

- Pengurus yang aktif di Partai Kebangkitan Bangsa harus melaksanakan sebaik baiknya dalam hal perekrutan kader-kader partai yang berkualitas. Kader yang berkualitas dapat menjalankan politik dengan baik karena semakin berkualitas para kader maka semakin baik dalam berpolitik. Karena kader merupakan ujung tombak sebuah partai oleh sebab itu elektabilitas dan akseptabilitas dan yang terakhir popularitas kader harus diimbangi pula seperti memanfaatkan media sosial dalam sosialisasi, sebab

perkembangan IPTEK yang telah maju, dengan memanfaatkan sosial media diharapkan dapat menambah popularitas kader DPC PKB kota Palembang.

- Calon legislatif yang akan diusung melalui partai PKB harus melakukan Riset terhadap perilaku pemilih harus benar-benar dilakukan dan dikaji secara serius oleh DPC PKB Kota Palembang dimana hasil riset tersebut diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan isu dan program kampanye yang tepat sasaran. Seperti PKB dapat menjalin kerjasama dengan lembaga riset independen tertentu seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) atau Center Search of Indonesian Sains (CSIS) atau yang lainnya untuk mendapatkan hasil riset yang lebih objektif. Penelitian mendatang hendaknya lebih mengarah pada tingkat kapabilitas kandidat Politik. Sebagai contoh penelitian mengenai tingkat kapabilitas tokoh *incumbent* dalam pemilihan calon legislatif Kota Palembang periode mendatang, ketika mendekati masa kampanye serta selesai pemilihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Vicky Randall dan Lars Svasand, “*Party Institutionalization in New Democracies*,” *Jurnal Party Politics* (Vol. 8 No 1 (2002))
- Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- R. Biorcio dan R. Mannheimer, “*Relationship Between Citizens and Political Parties*” dalam H-D Klingemann dan D. Fuchs, *Citizens and State* (Oxford: Oxford University Press, 1995)
- I Ketut Putra Erawan, “*Mission Impossible?: Reformasi Kepartaian di Indonesia*,” *Jurnal Dinamika Masyarakat* Vol. IV, No. 1 (2005)
- Agus Salim (ed.), “*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*,” Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Sugiono. “Memahami Penelitian Kualitatif”. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- AD/ART partai kebangkitan bangsa hasil mukhtamar luar biasa di Ancol, Jakarta 2-4 Mei 2010
- Partai Kebangkitan Bangsa, (*Dokumen Historis Pendirian PKB*, Jakarta: DPP PKB, 1999)
- Abdurrahman Wahid, (*Dokumen Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa*, Ciganjur: 1998)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemennya*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006)

Sutami Ismail S.Ag, Ketua Dewan pengurus cabang (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara*, Tanggal 3 Juni 2019

Sangi Riswanto, *Wawancara* tanggal 10 September 2019

Bendahara DPC PKB Kota Palembang, Subeni *wawancara* tanggal 13 September 2019

Ketua Garda Bangsa Pandi Renaldi *wawancara* tanggal 13 September 2019

Eza Triandy, (Ketua Gemasaba), *Wawancara*, Tanggal 1 Oktober 2019

PPKB, *Dokumen Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta : DPP PKB, 1999

Siti Suhaepa S.E, Sekretaris Dewan pengurus cabang (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa, *Wawancara*, Tanggal 1 Oktober 2019

DPP Partai Kebangkitan Bangsa, *Peraturan Perundang-Undangan PKB*, LPP PKB, 2011

LAMPIRAN



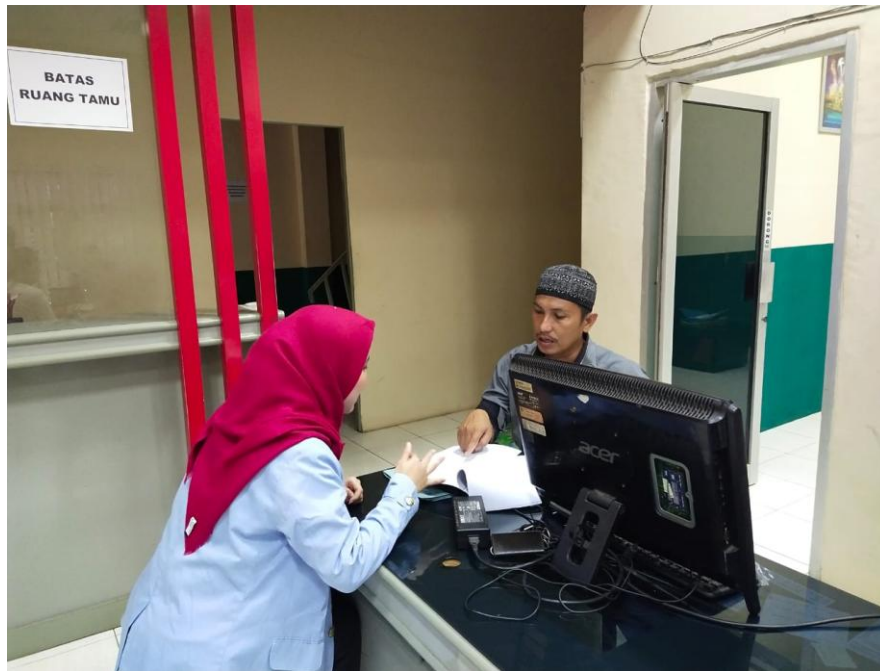
Sutami Ismail S.Ag
Ketua tanfidz PKB Kota Palembang





Siti Suhaepah
Sekretaris PKB Kota Palembang





Subeni

Bendahara DPC PKB Kota Palembang





Sangi Riswanto





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

**BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Pada hari ini Selasa Tanggal 21 April 2020 pukul 09.00 s.d 10.00 WIB Team Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Raden Fatah Palembang telah mengadakan sidang Munaqasyah (ujian skripsi) mahasiswa:

Nama : Shela Perila Octrien
TTL : Palembang, 06 Oktober 1996
NIM : 1564302027
Judul Skripsi : **POLA PENGKADERAN PARTAI POLITIK (Studi Kasus Dewan
Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)**

Dan memutuskan bahwa:

1. Setelah lulus seluruh mata kuliah dan mengikuti Ujian Munaqasyah, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** Munaqasyah dengan nilai 82,3
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal sejak ditetapkannya berita acara ini.
3. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum diselesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengijuti Ujian Munaqasyah kembali.
4. Setelah mahasiswa ybs memenuhi persyaratan point 1, 2, 3, maka penjiilidan skripsi harus mengambil surat pengantar dari sub bag akademik untuk persyaratan mengikuti yudisium dan wisuda.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEAM PENGUJI

JABATAN	NAMA/NIP	TANDA TANGAN
KETUA	Bety, S.Ag., MA/ 197004211999032003	1.
SEKRETARIS	Kiki Mikail, M.A/ 198409212019031004	2.
PENGUJI I	Bety, S.Ag., MA/ 197004211999032003	3.
PENGUJI II	Nico Oktaryo Adytyas, MA./2010109102	4.
PEMBIMBING I	Dr. M. Syawaluddin, M.Ag/ 197111242003121001	5.
PEMBIMBING II	Yulion Zalpa, MA/ 198807072019031011	6.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 21 April 2020
Sekretaris,

Ketua,

Bety, S.Ag., MA
NIP. 197004211999032003

Kiki Mikail, M.A.
NIP. 198409212019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

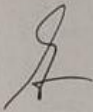
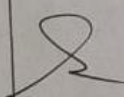
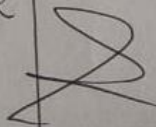
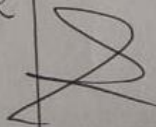
Jalan Prof.KH Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp (0711) 353480

Website : www.radenfatah.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Shela Perila Octrien
Nim : 1564302027
Jurusan : Politik Islam
Judul Skripsi : Pola Pengkaderan Partai Politik
(Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1	06 Maret 2019	Memeriksa isi partai	Asyiq	
2	21 Maret 2019	Revisi kembali penyusunan	Syawaludin di. par	
3	28 Maret 2019	apakah penyusunan Maka par	Kipar	

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
4.	8 APRIL 2019	ada buku kecil pembelian barang pembelian lain sec BUKU I		 
5	13 MEI 2019	ada buku kecil. sesuai pembelian. ada buku kecil dari SPO		 
6	8 JULI 2019	sec BUKU 2		
7	15 JULI 2019	ada buku kecil. sesuai pembelian. ada buku kecil dari SPO		 
8	29 JULI 2019	ada buku kecil. sesuai pembelian. ada buku kecil dari SPO		 
9	29 Januari 2020	ada buku kecil. sesuai pembelian. ada buku kecil dari SPO		



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

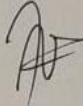
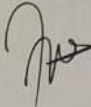
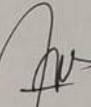
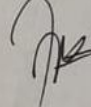
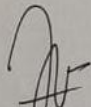
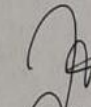
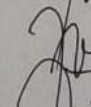
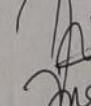
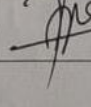
Jalan Prof.KH Zainal Abidin Fikry No.1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp (0711) 353480

Website : www.radenfatah.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Shela Perila Octrien
Nim : 1564302027
Jurusan : Politik Islam
Judul Skripsi : Pola Pengkaderan Partai Politik
(Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)
Dosen Pembimbing II : Yulion Zalpa, M.A

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1	09 Maret 2019	- Latar belakang Masalah belum & kur. - Rumusan Masalah dipersejajarkan.	Revisi BAB I	
2	18 Maret 2019	- Kerangka teori belum relevan. - Literatur Review ditambah	Revisi BAB I	
3	23 Maret 2019	- Ace BAB I	Lanjut BAB II	

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
4	02 Mei 2019	- Gambarkan sejarah PKK di tingkat lokal lebih dipaparkan lagi - Tambahkan dinamika politik di Kota Pekanbaru	Revisi BAB II	
		- Acc BAB II	Lamp. Kebl II	
5	10 Mei 2019	- Pola Perkotaan belum lengkap dipaparkan - Jelaskan atas kawasan masalah, belum lengkap	Revisi BAB III	
6	01 Juni 2019	- Perbaiki referensi masih keliru. - banyak data yang belum jelas	Revisi BAB III	
7	09 Juni 2019	- Perbaiki nomor catatan masih banyak, kutipan yang bercampur. - Minutkan subhensi Pola Perkotaan	Revisi BAB III	
8	10 Juni 2019	- Data yang tidak tahun diperbaiki.	Revisi BAB III	
9	25 Juni 2019	Acc BAB III	Lamp. data 4.	
10	09 Januari 2020	Kesimpulan harus menyambung kebabak.	Revisi BAB IV	
11	15 Januari 2020	Acc BAB Keseluruhan	Lamp. diidangkan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B- 108 / /Un.09/IV.1/PP.01/08/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Jurusan Politik Islam a.n. *Sheila Perila Octrien*, tanggal, 23 Juli 2019

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbago Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 31 tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP	Sebagai
Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag.	19711124 200312 1 001	Pembimbing I
Yulion Zalpa, M.A.	2007078803	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Saudara;

Nama : Sheila Perila Octrien

N I M : 156432027

Jurusan : Politik Islam

Judul Skripsi :

“Pola Pengkaderan Partai Politik

(Studi Kasus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang)”

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT 01 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2020

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

Sertifikat

No : B-427/ Un.09/PP.06/01/2018

Diberikan kepada :

Shela Perila Octrien

Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 06 Oktober 1996
NIM : 1564302027

Fak / Prodi : Adab & Humaniora / Politik Islam

Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Tahun 2017

Tema "KKN Berbasis Riset Dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter"

Dari Tanggal 27 November 2017 s/d 04 Januari 2018 di :

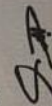
Kelurahan : Suka Mulya
Kecamatan : Sematang Borang
Kota : Palembang
Provinsi : Sumatera Selatan
Lulus dengan nilai : A

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku



Palembang, 22 Januari 2018

Ketua



Dr. Syahriyeni, M.Ag

NIP. 19730901 199703 2 003





Nomor : 15/Lab FAHUM/5-64/Tahfidz/II/2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : SHELA PERILA OCTARIEN
NIM : 1564302027
PRODI : POLITIK ISLAM
Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 6 OKTOBER 1996

Telah menyelesaikan tugas dengan baik dan memenuhi segala persyaratannya pada program

TAHFIDZ AL-QURAN

Dengan Predikat :

Amat Baik / Baik / Cukup / Kurang

Diberikan di Palembang pada tanggal 3 Februari 2020



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP. 197011142000031002



Kepala Laboratorium,

Drs. Masyhur, M.Ag., Ph.D
NIP. 19671211 199403 1 002



DEC

House of English & Other Courses

Jl. Padmajaya No. 121 A Kel. 9/10 Ulu Palembang

TOEFL PREDICTION CERTIFICATE

This to certify that

Shela Perila Octrien

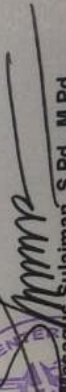
Day & Date of Test : Thursday, January 24th 2019

Has successfully completed The English Proficiency Test Conducted by DEC



Prediction Test For the TOEFL	
Components	Digit
Listening Comprehension	39
Structure & Written expression	41
Reading Comprehension	48
Overall	420

Palembang, January 26th 2019


Masagus Sulaiman, S.Pd., M.Pd
Supervisor



PANITIA PELAKSANA
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
TAHUN AKADEMIK. 2014 - 2015



Sertifikat

Diberikan Kepada :

NAMA : SHELA PERILA OKTRIEN

NIM : 14421027

Sebagai Peserta Didik Baca Tulis Al-Quran dan Dinyatakan
Lulus Dengan Nilai B

Mengetahui
Dekan,

Palembang, November 2015
Ketua,



Maryuzi

Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A.
NIP. 19560713 198503 1 001

Maryuzi, S.Ag
NIP. 19700901 200003 1 003



Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM 3,5 PALEMBANG 30126 Telp. 0711-354668 Fax. 0711-356209



SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 040 / 2015

Diberikan kepada :

SHELA PERILA OCTRIEN
NIM : 14421027

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2014 - 2015

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2007	B	B
Microsoft Excel 2007	B	

Palembang, 06 Juli 2015
 Kepala Unit,

 M. Kom Fahruddin
 NIP. 19750522 201101 1 001

